

KEPEMIMPINAN IDEAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN OPTIMAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG MENURUT IBNU KHALDUN

IDEAL LEADERSHIP FOR OPTIMAL HEALTH SERVICES IN CIBINONG REGIONAL PUBLIC HOSPITAL ACCORDING TO IBNU KHALDUN

Derissa Miranti¹, Saprudin²

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Juanda, derissa.miranti@gmail.com

²Magister Administrasi Publik, Universitas Juanda, saprudin@unida.ac.id

ABSTRACT

A Currently, health services need leaders who can respond quickly and have the right solutions to health problems. According to Ibnu Khaldun, leaders must have character that influences the society they lead. A leader must not only be charismatic but also close to the community. The requirement for a leader who is charismatic and meets the standards set in a sovereign territory is to strengthen his country's sovereignty so that it is not easily removed or taken over by another country. According to Article 4 of the Health Law, optimal health services are the right of every citizen. The method used is to search for ideal guide journals for optimal health services, including sample study design and research results in the journals searched. Currently, health services need leaders who can respond quickly and have the right solutions to health problems. In addition to the ideal leadership criteria mentioned above, today's health industry not only requires crisis leadership but also digital leadership and transformational leadership.

Keywords: Leadership, Health Services.

ABSTRAK

Saat ini, layanan kesehatan membutuhkan pemimpin yang dapat merespon dengan cepat dan memiliki solusi yang tepat terhadap permasalahan kesehatan. Menurut Ibnu Khaldun, pemimpin harus mempunyai karakter yang mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin tidak hanya harus karismatik tapi juga dekat dengan masyarakat. Syarat seorang pemimpin yang karismatik dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam suatu wilayah kedaulatan adalah memperkuat kedaulatan negaranya agar tidak mudah disingkirkan atau diambil alih oleh negara lain. Menurut Pasal 4 Undang-Undang kesehatan, pelayanan kesehatan yang optimal merupakan hak setiap warga negara. Metode yang digunakan adalah dengan mencari jurnal panduan ideal pelayanan kesehatan yang optimal, meliputi desain kajian sampel dan hasil penelitian pada jurnal yang dicari. Saat ini layanan kesehatan membutuhkan pemimpin yang dapat merespons dengan cepat dan memiliki solusi yang tepat terhadap permasalahan kesehatan. Selain kriteria kepemimpinan ideal yang disebutkan di atas industri kesehatan saat ini tidak hanya membutuhkan kepemimpinan krisis tetapi juga kepemimpinan digital dan kepemimpinan transformasionalis.

Kata Kunci : *Kepemimpinan, Pelayanan Kesehatan.*

PENDAHULUAN

Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh Islam yang terkenal dengan pemikirannya di bidang Sejarah sosiologi politik dan memiliki pengalaman yang luas khususnya di bidang politik. Ketika Ibnu Khaldun masih kecil, beliau berangkat menunaikan ibadan haji dan melanjutkan perjalanannya ke Kairo Mesir, yang pada saat itu merupakan pusat peradaban ilmu pengetahuan. Pada masa inilah Ibnu Khaldun memperdalam ilmunya. Saat di Mesir, Ibnu Khaldun melihat sendiri kemunduran dan kehancuran peradaban Islam, beliau menyaksikan dan mengalami kekalahan politik yang telah dibentuk dan diusungnya sejak awal.

Untuk mencapai Tingkat Kesehatan yang optimal bagi seluruh Masyarakat, diperlukan payung hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan bidang Kesehatan. Pada awalnya Upaya Kesehatan Masyarakat hanya sebatas pengobatan penyakit dan pemulihan Kesehatan, kemudian secara bertahap berkembang menjadi Upaya Pembangunan Kesehatan yang terpadu dan berkelanjutan meliputi Upaya promosi, pencegahan (prevention), pengobatan dan rehabilitasi (pemulihan). Inisiatif Kesehatan yang diuraikan di atas dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan lingkungan, termasuk lingkungan ekonomi fisik dan biologis yang kompleks. Menyadari betapa meluasnya hal ini, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan layanan Kesehatan yang komprehensif, terpadu, adil, dapat diterima Masyarakat dan terjangkau melalui system Kesehatan nasional untuk mencapai Tingkat Kesehatan Masyarakat yang optimal.

Kepemimpinan secara harfiah berarti manajemen, kata manajer itu memiliki arti mengarahkan, membangun atau mengatur, dan juga kinerja atau memiliki dampak. Manajer punya tanggung jawab untuk sukses baik secara fisik maupun mental. Aktivitas kerja dalam

memimpin banyak orang tidak mudah, menjadi pemimpin itu tidak sederhana dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Menurut Wahjosumidjo (2005:17), kepemimpinan dapat diterjemahkan sebagai karakteristik, perilaku pribadi, pengaruh, model, interaksi, hubungan kolaboratif antar peran, satu posisi manajerial, persuasi dan persepsi orang lain mempengaruhi legitimasi. Kepemimpinan menurut Miftah Thoha (2010:9) adalah kegiatan yang bertujuan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik individu maupun kelompok. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kekuatan yang menggerakkan orang dan mempengaruhi banyak orang. Kepemimpinan tidak lebih dari sebuah alat, metode atau proses untuk membujuk orang agar melakukan sesuatu secara sukarela terhadap keinginan orang lain untuk memenuhi keinginan pemimpinnya. Berikut beberapa kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar orang lain dapat memenuhi keinginannya, yaitu berupa ancaman, imbalan, dan wewenang. Definisi lain mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya secara efektif untuk mencapai tujuan penting.

Meskipun terdapat banyak definisi mengenai konsep kepemimpinan, namun maknanya kurang lebih sama dengan beberapa ahli yang mendefinisikan hal tersebut. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka dibuatlah definisi yang menjadi dasar pembahasan konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah hubungan saling mempengaruhi antara seorang pemimpin dengan orang-orang dan masyarakat yang ingin mereka ubah demi tujuan bersama.

Kepemimpinan meliputi kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap ikhlas terhadap tanggung jawab

(compassion), pengetahuan (civility), keberanian bertindak dengan percaya diri (commitment), percaya pada diri sendiri dan orang lain (trust), serta kemampuan membujuk orang lain (persuasi). Seorang pemimpin pada dasarnya harus mempunyai fungsi mengaktifkan atau mendinamiskan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, seluruh dana dan fasilitas yang disiapkan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut terminologi yang dikemukakan oleh Mullifield dan Hamzah, kepemimpinan atau kepemimpinan disebut Ziama atau Imama dalam bahasa Arab. Kepemimpinan adalah tentang menginspirasi, memobilisasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan motivasi dan loyalitas orang-orang yang terlibat dalam upaya kolektif. Kata pemimpin dan kepemimpinan mempunyai arti suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik struktur maupun fungsinya. Keduanya saling berhubungan dan mempunyai kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin atau manajer harus fokus pada transaksi interpersonal antara manajer dan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran ini didasarkan pada Kepemimpinan transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional terdiri dari dua kata yaitu kepemimpinan dan transformasional atau transformatif. Istilah "transformatif" berasal dari kata "transform" yang berarti mengubah atau mengubah sesuatu ke dalam bentuk lain. Kepemimpinan transformasional adalah suatu tindakan dimana seorang pemimpin meningkatkan kesadaran karyawan akan apa yang penting, meningkatkan kematangan motivasi mereka, dan mendorong mereka untuk bergerak melampaui kepentingan individu untuk mencapai kepentingan kelompok. Oleh karena itu, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang karismatik dan

mempunyai peranan sentral dan strategis dalam membimbing organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mampu menyelaraskan visi masa depan mereka dengan bawahannya dan meningkatkan kebutuhan mereka ke tingkat yang lebih tinggi dari yang diperlukan.

Tujuan dan peranan seorang pemimpin sangat menentukan arah dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, keberadaan pemimpin menjadikan suatu organisasi sebagai suatu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan bertumbuh. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibagi menjadi lima bidang kepemimpinan utama:

- a. Fungsi Pengarahan. Fungsi ini memberikan komunikasi satu arah antara manajemen dan pemangku kepentingan untuk menentukan apa, bagaimana, kapan, dan di mana harus melaksanakan perintah sehingga keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan orang lain dan memotivasi mereka untuk melaksanakan perintah.
- b. Fungsi Nasihat dimaksudkan untuk menerima masukan berupa umpan balik guna menyempurnakan keputusan yang diambil dan dilaksanakan.
- c. Fungsi Partisipatif. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berupaya mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan melaksanakannya.
- d. Fungsi Pendelegasian. Fungsi ini dilakukan dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan dengan atau tanpa persetujuan pemimpin.
- e. Fungsi delegasi pada hakikatnya berarti bahwa mereka yang menjadi tuan rumah harus dipercaya

membantu seorang pemimpin yang mempunyai prinsip, persepsi, dan aspirasi yang sama.

- f. Fungsi pengendalian artinya kepemimpinan yang berhasil atau efektif mampu mengatur kegiatan anggotanya secara terarah dan terkoordinar secara efektif melalui dorongan, penghargaan yang efektif, dan tersedianya sumber untuk belajar sehingga tercapai tujuan bersama.

Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, jika menilik sejarah, tentu kita akan menjumpai nama-nama bangsa dan suku besar, seperti Persia, Arab, Yunani, Quraisy, dan suku lainnya. Sepanjang sejarah, sebagian besar atau hampir seluruh manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil, dan kemudian membentuk masyarakat. Hal ini terlihat di banyak negara dan kelompok etnis yang lebih kecil dengan identitas berbeda. Situasi ini telah terjadi sejak lahirnya Islam dan bahkan sebelum itu. Munculnya kelompok masyarakat ini karena adanya kebutuhan akan sesama, kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan akan seorang pemimpin. Eksistensi suatu bangsa atau masyarakat yang besar tidak lepas dari karakter pemimpinnya. Hal ini tidak dapat dihindari, sebab ujung tombak yang menentukan keberhasilan suatu kelompok ada di tangan pemimpinnya.

Memiliki seorang pemimpin juga membantu menjaga stabilitas. Tidak semua orang dalam kelompok mempunyai minat yang sama. Seseorang secara naluriah berusaha mencapai sesuatu untuk mencapai kepentingannya sendiri. Agar dapat mencapai keinginan tersebut, seringkali timbul persaingan antar manusia. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan hidup, dibutuhkan kesepakatan dan terdapat kelompok yang mengikuti kesepakatan tersebut secara bersama-sama.

Kehadiran seorang pemimpin mempunyai tujuan yang sangat penting. Kepemimpinan setidaknya memiliki dua tujuan yaitu Tujuan untuk mencapai kemaslahatan tidak hanya dalam bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam bidang keagamaan. Untuk memperoleh keuntungan dalam bidang keagamaan perlu dilakukan perbaikan dalam kehidupan spiritual masyarakat. Jika tujuan ini diabaikan, maka dapat menimbulkan kerugian baik di kehidupan saat ini maupun di akhirat.

Di sisi lain, pencapaian manfaat dalam bidang ekonomi dan sosial dilaksanakan melalui tata kelola keuangan negara untuk kepentingan rakyat (sebagai bagian dari pengelolaan negara) dan juga dengan menjamin perdamaian melalui upaya penegakan hukum Islam. Dalam konteks penduduk Arab, negara Arab Saudi dikenal sebagai negara yang masyarakatnya hidup dalam kelompok besar yang memiliki ikatan sosial yang kuat antar sesama. Berdasarkan latar belakang tersebut, dinamika kepemimpinan yang berkembang di masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Permasalahan kepemimpinan di negara Arab secara tradisional berfokus pada sistem etnis dan keluarga dalam konsep kepemimpinan regional. Landasan penting kepemimpinan dalam masyarakat Arab adalah Syekh, pemimpin suku laki-laki yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Arab, dan pemahaman tentang status dan aturan Syekh dalam masyarakat Arab menjelaskan hal tersebut.

Pada intinya, kepemimpinan adalah sistem yang dibangun berdasarkan hubungan. Mengutip Abbas J. Ali, Hughes menekankan bahwa kepemimpinan adalah hasil interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah sebuah hubungan relasi dan persepsi, bukan sesuatu yang ditentukan berdasarkan kepribadian atau situasi.

Menurut pendapat Wilner yang di setujui oleh Conger dan Kanungo menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah karakteristik dari pengikut yang mengamati perilaku tertentu seorang pemimpin dalam konteks organisasi. Mereka mengatakan kharisma seorang pemimpin dinilai berdasarkan empat hal yang saling berkaitan.

Hal ini mencakup sejauh mana kesenjangan antara situasi saat ini dan tujuan serta visi masa depan yang ingin dicapai para pemimpin, penggunaan inovasi dan cara-cara yang tidak konvensional untuk mencapai perubahan yang diinginkan, serta penilaian sumber daya lingkungan yang realistis dan hambatan untuk tercapainya perubahan yang diinginkan.

Di sisi lain, Edwin A. Locke menyatakan bahwa ada tiga unsur kepemimpinan yaitu: Pertama, seorang pemimpin adalah orang yang menciptakan konsep hubungan antar manusia. Seseorang dapat disebut pemimpin apabila ia mempunyai hubungan dengan orang lain, dalam hal ini para pengikutnya. Apabila tidak memiliki pengikut, maka tidak dapat disebut sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin harus tahu bagaimana menciptakan inovasi dan koneksi dengan para pengikutnya. Kedua, kepemimpinan adalah sebuah proses. Agar kepemimpinan dapat berperan aktif maka para pemimpin harus secara aktif menunjukkan kepemimpinan. Meskipun posisi otoritas memegang peranan penting dalam memfasilitasi proses kepemimpinan, namun posisi otoritas saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin. Ketiga, pemimpin harus bisa memotivasi bawahannya untuk mengambil tindakan. Persuasi terjadi dalam berbagai cara, termasuk menciptakan model, menggunakan otoritas yang sah, menegakkan tujuan, menawarkan penghargaan dan hukuman, dan mengkomunikasikan visi.

Pada dasarnya, jika menyangkut persoalan kepemimpinan, dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana seharusnya sistem kepemimpinan yang ideal. Selain itu, aspek fundamental dalam Islam yaitu Tauhid (kepercayaan SWT pada Keesaan Allah) harus dipenuhi. Kepemimpinan dalam Islam melibatkan bagaimana melatih dan menginspirasi orang-orang beriman untuk mencapai tujuan. Selanjutnya seorang pemimpin tidak dapat melakukan sesuatu atau mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri karena sebuah keputusan harus menguntungkan semua pihak dan tidak berdasarkan keinginannya sendiri. Sebuah keputusan pada dasarnya harus dilakukan semuanya karena Allah SWT.

Kajian yang dilakukan oleh Darweesh Almoharbi menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam tidak didasarkan pada legitimasi berdasarkan otoritas tradisional, namun pada satu tujuan bersama, penegakan hukum rasional berdasarkan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, arti dari seorang pemimpin adalah khalifah dan pemerintahannya sering disebut dengan khilafah. Selain istilah Khalifah, ada juga istilah Imama. Ada perbedaan arti dalam kedua istilah tersebut. Definisi ini menyatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang adil, berilmu, berakhlak mulia, atau diangkat oleh pemimpin sebelumnya (Khalifah), dan kemudian mempengaruhi aturan yang harus dilakukan oleh pengikutnya.

Literatur awal ini sering kali menekankan legitimasi dan pentingnya para pemimpin untuk memperoleh petunjuk. Pendapat berbeda pun diungkapkan Al-Baydawi, beliau meyakini Khalifah merupakan penerus Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu tokoh yang patut dicontoh dalam menegakkan hukum syariah dan melindungi hak milik umat. Sementara itu, menurut Al-Quran, khilafah adalah bentuk pemerintahan manusia yang

benar, pengakuan negara atas kepemimpinan dan kekuasaan Allah SWT. Kaum Syi'ah mewajibkan seorang imam berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti seorang nabi, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib diangkat oleh Rasulullah SAW. Ia menjadi seorang imam dengan mengutip ayat yang tidak diketahui oleh para ulama Sunni dan menafsirkannya menurut sekteanya. Seorang pendeta harus memiliki setidaknya tiga kualitas yang terkait dengannya. Artinya imam dipilih dan diangkat oleh Allah SWT, karena tidak menjadi kesepakatan bersama dalam Masyarakat umum, maka ia mempunyai ilmu yang menyeluruh, ilmu pengetahuan yang diperoleh tanpa dipelajari, ilmu kepada Allah SWT.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang Kepemimpinan, secara umum karya besar Ibnu Khaldun yaitu *Muqadimah* menceritakan tentang kehidupan sosial dan keadaan sosial yang terjadi di sekitarnya. Ketika dia menulis tentang masyarakat ini, dia memikirkan mengapa masyarakat membutuhkan kepemimpinan.

Di sisi lain gagasannya menekankan kepemimpinan politik dalam unit sosial. Kesimpulan ini dapat diperluas untuk mencakup kepemimpinan dalam berbagai lingkungan organisasi. Menurut keyakinan Islam, pengangkatan pemimpin adalah wajib. Ibnu Khaldun pun meyakini hal tersebut, menurut pandangan syariat dan berdasarkan ijma (kesepakatan) Ikhwanul Muslimin, komitmen ini tercermin dalam Sejarah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat ini para sahabat sedang terburu-buru mencari tahu siapa yang akan menjadi pemimpin penerus Rasulullah SAW.

Demikian pula di setiap era sejak era Ikhwanul, terjadi pergantian kepemimpinan pasca wafatnya pemimpin sebelumnya. Islam memberikan Batasan/aturan bagi manusia untuk berorganisasi dalam

situasi tersebut. Menurut sebagian ulama, rasionalitas (akal) menjadi dasar pengangkatan pemimpin, namun Ijma hanya sekedar menguatkan akal dalam hal ini. Ibnu Khaldun pun berpendapat demikian.

Menurutnya, dalil mendasar yang mengharuskan pengangkatan pemimpin antara lain masyarakat harus hidup secara berkelompok dan tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Konsekuensi dari hidup bermasyarakat atau berkelompok adalah adanya konflik, konflik timbul karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan anggota masyarakat. Kegagalan mengendalikan masyarakat ini kemungkinan besar akan mengakibatkan perbedaan pendapat dan pertengkaran yang pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran serta kepunahan umat manusia.

Ibnu Khaldun menolak beberapa pendapat yang menganggap pengangkatan pemimpin atas dasar rasionalitas atau syariah tidaklah penting. Menurut mereka, penegakan hukum dan syariah itu wajib. Pendapat tersebut antara lain diungkapkan oleh al-Asham dari kalangan Mu'tazila dan beberapa kalangan Khawarii. M

ereka berpendapat bahwa ketika suatu bangsa sudah mempunyai sistem hukum melalui pelaksanaan hukum perdamaian, maka tidak diperlukan lagi seorang pemimpin. Mereka berusaha menghindari dari sebuah kekuasaan serta kodratnya yang merampas, menguasai, dan meninggalkan kenikmatan dunia. Mereka menyatakan tipe kepribadian seperti ini dikutuk dan dilarang oleh Syariah. Faktanya, Syariah tidak mengkritik kekuasaan atau melarang penegakannya namun, Syariah hanya mengutuk kerugian yang ditimbulkan ketika kekuasaan digunakan secara tidak baik, seperti pemaksaan, penindasan, dan penurunan kesenangan duniawi.

Di sisi lain syariah menjunjung tinggi hakikat keadilan dan toleransi, menjunjung tinggi ajaran agama dengan segala tradisinya, serta menerapkannya dalam sebuah kehidupan. Oleh karena itu, Syariah hanya mengkritik jenis kekuasaan tertentu. Dalam konteks Islam, Ibnu Khaldun sendiri, seperti perkataan Abbas Zaidi yang dikutip Akbar S. mengatakan bahwa keadaan di masyarakat harus dipedomani. Kepemimpinan dapat dicapai melalui kontrol. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional harus berasal dari kelompok yang secara kolektif mempunyai keunggulan dibandingkan kelompok lain. Dengan adanya kondisi seperti ini maka pengikut akan mengikuti dan tunduk kepada pemimpinnya. Munculnya seorang pemimpin tidak terlepas dari keberadaan Asabiyya, kelompok ini memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Asabiyya lazim terjadi pada orang-orang yang berasal dari satu garis keturunan atau suku yang sama. Ada perasaan superioritas atas kelompok di antara mereka. Emosi kelompok idealnya ada pada setiap orang yang mendambakan kepemimpinan yang menghargai harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat.

Selain Asabiyya, ada hal penting dalam membangun kepemimpinan yaitu agama. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama memiliki kekuatan untuk menyatukan sebuah kelompok, sehingga dapat memperkuat Asabiyya. Agama berfungsi untuk memperkuat kelompok yang memungkinkan terbangunnya kerajaan. Perilaku seluruh anggota kelompok diatur oleh keyakinan dalam beragama, sehingga sifat hewaninya terkendali. Ibnu Khaldun tetap meyakini agama bisa menyatukan sebuah kelompok, padahal pada kenyataannya ada kelompok yang bisa menciptakan solidaritas sosial tanpa agama. Bahkan, menurutnya, persatuan yang diciptakan oleh agama jauh lebih

kuat dibandingkan persatuan yang diciptakan oleh Asabiyya itu sendiri.

Ibnu Khaldun menggambarkan situasi di mana kepemimpinan stabil dan keyakinan agama kokoh dalam kepemimpinan. Ibnu Khaldun menyebutkan suku Quraisy dalam sebuah hadits yang berkaitan dengan Asabiyyah, dimana Makkah merupakan satu-satunya pemerintahan pada saat itu yang pemerintahannya cukup kuat untuk menyatukan semua suku lainnya untuk mempersatukan umat Islam.

Pelayanan kesehatan adalah seluruh tindakan dan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif untuk mengobati penyakit tersebut. Segala usaha dan kegiatan meningkat dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesional kesehatan internal untuk mencapai masyarakat yang sehat. Tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang diharapkan dan derajat kebutuhan masyarakat (kepuasan pelanggan) melalui pelayanan yang efisien dari penyedia jasa kesehatan serta memberikan kepuasan bagi masyarakat dan kebutuhan penyedia layanan (kepuasan penyedia layanan) dalam lembaga pelayanan yang dilaksanakan secara efektif (Institutional kepuasan) (Wulandari, 2016).

Intinya pelayanan kesehatan diprioritaskan sebagai upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah usaha untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pencegahan membuat masyarakat terhindar dari sebuah penyakit. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya terpusat dalam mengobati orang sakit, tetapi yang lebih penting adalah usaha pencegahan dan peningkatan kesehatan agar bentuk pelayanan Kesehatan tidak hanya berpusat pada kesehatan masyarakat, tetapi juga bentuk kegiatan pelayanan Kesehatan lain, baik dalam hal meningkatkan

kesehatan maupun mencegahnya sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan pelayanan kesehatan (Sari, 2013).

Menurut Parasuraman (dalam Nurbaeiti, 2016) faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap suatu kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Bukti nyata (tangibile)
- b. Keandalan (Reliability)
- c. Kesigapan (Responsiveness)
- d. Jaminan (Assurance)
- e. Empati (Emphaty)

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat aturan dasar yang harus terpenuhi sehingga pelayanan kesehatan dikatakan baik. Kondisi ini harus tersedia dan berkelanjutan, dapat diterima dan masuk akal, dapat diakses oleh masyarakat dan berkualitas tinggi.

Kewajiban Pemerintah terhadap hak atas derajat pelayanan kesehatan yang Optimal. Landasan mendasar dari tugas pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia adalah prinsip demokrasi, bahwa pemerintah sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melindungi hak-hak warga negara. Selain itu, konsep negara sejahtera (welfare state) sebagai konsep negara modern memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan atau keputusan. Hak ini digunakan untuk memajukan dan mencapai perwujudan hak asasi manusia. Begitu juga hak kesehatan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Dalam Ayat 1 pasal 9 Undang-undang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang seitinggi-tingginya. Kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Meskipun hak asasi manusia mempunyai tanggung jawab, namun hal tersebut hanya merupakan batasan agar

perwujudan hak asasi tersebut tidak melanggar hak asasi orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengalaman langsung, akan tetapi dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan topik dilakukan dengan menggunakan google scholar, research gate, dan pubmed dengan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan literature review, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sehingga hasil dari studi literature tersebut dapat diakui kredibilitasnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan atau inventarisasi masalah. Masalah penelitian (research problem) merupakan sesuatu yang penting di antara proses lain, dikarenakan hal tersebut menentukan kualitas suatu penelitian. Dalam

penelitian ini peneliti mengkaji permasalahan melalui jurnal-jurnal penelitian internasional dan nasional yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian.

2. Screening

Screening adalah penyaringan atau pemilihan data yang gunanya untuk memilih masalah penelitian yang sesuai dengan topik. Dalam penelitian ini ekstraksi data menggunakan kata kunci judul jurnal, tahun terbit, tipe jurnal, dan topik permasalahan.

3. Penilaian Kualitas

Dalam penelitian kualitas pada metode Literature Review (LR) yang dimaksud adalah penelitian sumber data jurnal yang layak dengan kriteria: terdapat DOI, Peer Review, Journal Impact Factors (JIF), Internasional Standard Serial Number (ISSN). Kriteria tersebut dapat membatalkan data jurnal yang sudah didapat untuk dianalisa lebih lanjut.

4. Ekstraksi Data

Ekstraksi data dapat dilakukan jika semua data yang diperoleh telah memenuhi syarat telah diklasifikasikan untuk semua data yang ada.

Setelah proses screening dilakukan maka hasil dari ekstraksi data ini dapat diketahui pasti dari jumlah awal data yang dimiliki berapa yang masih memenuhi syarat untuk selanjutnya di analisa lebih jauh dan relevan Strategi yang digunakan dalam mencari artikel jurnal menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang relevan dengan topik. Keyword atau kata kunci yang digunakan sesuai dengan masalah pada penelitian yaitu yang berhubungan dengan Kepemimpinan Islam dan Pelayanan Kesehatan.

Kriteria inklusi dan eksklusi untuk menentukan strategi dalam pencarian literature menggunakan PICOS framework yang terdiri dari:

a. Population/problem yaitu populasi atau permasalahan yang akan

dianalisis sesuai dengan isu utama yang telah ditentukan oleh penelaah di dalam literature review;

- b. Intervention yaitu Tindakan penatalaksanaan yang dilakukan terhadap suatu masalah sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh penelaah di dalam literature review;
- c. Comparation yaitu perbandingan dari intervensi atau penatalaksanaan lain. Apabila tidak ada, maka dapat menggunakan kelompok control dari studi yang dipilih;
- d. Outcome yaitu hasil yang didapat dari studi terdahulu sesuai dengan topi yang ditentukan dalam literatur review;
- e. Studi design yaitu desain penelitian dalam jurnal penelitian yang akan digunakan untuk ditelaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah sakit merupakan unit organisasi khusus dalam sistem pelayanan kesehatan. Indikator kinerja rumah sakit tidak dapat dipisahkan dari indikator kinerja pelayanan kesehatan. Tujuan utama Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan medis sesuai dengan Program Kabupaten Bogor yaitu Pancakarsa, dimana salah satunya adalah Karsa Bogor Sehat. Peningkatan kesehatan merupakan salah satu inisiatif paradigma pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Peningkatan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan kemampuan hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan dalam peningkatan layanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas dan kualitas layanan yang terus berkembang dengan baik. Terbukti dengan peningkatan jumlah pasien, penambahan layanan unggulan, dan kualitas layanan kesehatan.

Ruimah Sakit Umum Daerah Cibinong merupakan rumah sakit pendidikan Tipe B yang secara administratif terletak di Wilayah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan kabupaten terluas keempat di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 2.986,2 km², terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, dan jumlah penduduk 5.473.476 jiwa. Kabupaten Bogor terbentang dari perbatasan timur yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta hingga perbatasan barat yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Secara umum wilayah Kabupaten Bogor mudah dijangkau dari berbagai arah karena dilintasi oleh jalan raya nasional yang besar sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bogor.

Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong memberikan pelayanan terbaik sebagai rumah sakit rujukan regional. Tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong adalah mewujudkan rumah sakit yang ramah lingkungan (green hospital). Berdasarkan visi dan misi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong akan meningkatkan sistem manajemen rumah sakit dengan memanfaatkan aplikasi, digitalisasi layanan, logistik dan keuangan, serta mewujudkan sistem manajemen terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023. Untuk itu diperlukan pemimpin yang ideal dalam pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.

Kesehatan bukan hanya milik Sebagian orang, tetapi Kesehatan adalah hak semua warga negara. Negara sebagai wujud atau gambaran kepentingan publik sangat berbeda dengan kepentingan pribadi yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri atau pribadi. Menurut Ibnu Khaldun, negara harus memiliki kekuatan solidaritas (ashabiyya) atau persatuan dan kebersamaan antar seluruh individu,

kelompok, dan suku/ras dalam suatu negara. Kekuasaan dan politik bagi Ibnu Khaldun mempunyai tujuan yang substansial. Inilah tujuan diciptakannya manusia sebagai hamba Tuhan, kemudian diutus ke bumi untuk menjadi khalifah atau pemimpin.

Ibnu Khaldun menegaskan, kepemimpinan ada apabila terdapat keunggulan dalam diri individu. Menurut Ibnu Khaldun, kepemimpinan yang baik memerlukan kebaikan dan tekad untuk melindungi rakyat. Ibnu Khaldun mulai menyadari bahwa kemajuan masyarakat bergantung pada kepribadian seorang penguasa yang bijaksana, yaitu mendukung kepemimpinan politik dan sekaligus pendidikan ilmiah. Inovasi di bidang kesehatan, pengelolaan pusat kesehatan, dan kepemimpinan menjadi faktor pendukung untuk transformasi kesehatan. Pada tahun 2020, seluruh dunia telah diuji dengan pandemi Covid-19 khususnya sektor kesehatan. Saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia terbukti mampu melewati pandemi Covid-19 dengan baik. Sebagai wujud nyata peningkatan layanan Kesehatan rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya harus lebih baik dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Ketika mesin-mesin baru diciptakan dan terobosan ilmiah dalam bidang obat-obatan atau vaksin ditemukan, layanan kesehatan harus merespon secara tepat untuk menghindari dampak negatif terhadap pasien yang mereka rawat.

Tenaga Kesehatan menjadi garda terdepan dalam Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemampuan dalam menghadapi tekanan, tindakan yang cepat, dan kompetensi tertentu diperlukan dalam diri seorang pemimpin untuk menjalankan fasilitas kesehatan secara efektif. Dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap orang merupakan bagian dari unsur kesejahteraan, untuk itu diperlukan pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan ideal dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong menurut pandangan Ibn Khaldun menekankan pentingnya solidaritas dan keadilan dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal. Rumah sakit sebagai unit organisasi khusus harus mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan medis sesuai dengan program Karsa Bogor Sehat yang merupakan bagian dari inisiatif pembangunan nasional. Keberhasilan peningkatan layanan kesehatan dipengaruhi oleh aksesibilitas dan kualitas yang terus terjaga, terbukti dengan peningkatan jumlah pasien dan layanan unggulan di RSUD Cibinong.

Sebagai rumah sakit pendidikan Tipe B, RSUD Cibinong memiliki visi dan misi untuk menjadi green hospital dan meningkatkan sistem manajemen dengan digitalisasi layanan. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis 2018-2023 yang membutuhkan kepemimpinan ideal untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya soal administrasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk melindungi hak kesehatan seluruh warga negara.

Ibn Khaldun menekankan bahwa kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada kepribadian yang unggul, kebajikan, dan tekad untuk melindungi rakyat. Kepemimpinan yang bijaksana dalam bidang politik dan pendidikan ilmiah sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan kesehatan, pengelolaan pusat kesehatan, dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam transformasi kesehatan, terutama setelah ujian berat dari pandemi Covid-19.

Dalam konteks ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Kemampuan menghadapi tekanan, bertindak cepat, dan kompetensi tertentu sangat diperlukan dalam menjalankan fasilitas kesehatan secara efektif. Oleh karena itu, pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan layanan kesehatan harus mampu memimpin transformasi digital dan memahami teknologi kesehatan untuk memberikan respons cepat terhadap perubahan dan tantangan baru. Hal ini sangat penting untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Kepemimpinan yang demikian akan memastikan bahwa setiap inovasi dan terobosan ilmiah di bidang kesehatan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astohar, 2012, Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership) Sebagai Gaya Kepemimpinan Dalam Memajukan Organisasi, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), Vol. 3, No. 2.
- Batubara, Galdah Tapansari, 2017, Memilih Pemimpin Religius-Kultural Menuju Masa Depan Jabar Yang Amanah, Cakrawala Ilmiah ISSN.0852-8310 XI, Eidisi 157.
- Enan, 2013, Biografi Ibnu Khaldun, terjemahan Machnun Husein, Jakarta: Zaman.
- Hidayat, Rif 'atul, 2009, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, hlm. 127-134.
- Idi, Jahidi, dan Moch, Hafid, Transformasional Leadership Dan Servant Leadership: Tantangan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Global, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3, No. 2, ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674.

- Inayatul, Mas'adah, 2021, *Kepemimpinan Dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun)*, Vol.20, No.2, ISSN(print) 1412-5188.
- Miswanto, 2008, *Pengembangan Model Kepemimpinan Transformasional* Vol.7 Nomor 3 ISSN: 1412-3851 Fokus Ekonomi (FE), Hal. 136 – 146.
- Murdiono, Mukhamad, 2006, *Citra Penguasa Ideal Dalam Perspektif Politik Ibnu Khaldun dan Relevansinya Bagi Kepemimpinan di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vo.11, No.2: 33-46.
- Mulia, Muji, 2019, *Teori Asabiyyah Ibn Khaldun Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.3, No.2.
- Norzailan, Z., Othman, R. B., & Ishizaki, H, 2016, *Strategic leadership competencies: What is it and how to develop it?* *Industrial and Commercial Training*,48(8). <https://doi.org/10.1108/ICT-04-2016-0020>.
- Slamet, Kurnia, Titon. 2007, *Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Sulistyo, Heru, 2009, *Analisis Kepemimpinan Spiritual Dan Komunikasi Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan*, *EKOBIS* Vol.10, No.2: 311 – 321.
- Sumantri, Teguh, (2020), *teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia*, *Jurnal Tamaddun Sejarah Kebudayaan Islam*, Vol.8, Issue 1.